

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Stakeholder (Stakeholder theory)*

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan Menurut Budimanta Dkk (2008).

Menurut Jones (2011) menjelaskan bahwa *stakeholders* dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a) *Inside stakeholder*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dan karyawan.

b) *Outside stakeholder*, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali, 2007). *Stakeholder theory* adalah "Teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu

perusahaan dan memaparkan bahwa perkembangan konsep stakeholder dibagi menjadi tiga yaitu model perencanaan perusahaan, kebijakan bisnis dan corporate social responsibility (Roberts (1992).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Oleh karena itu, ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan stakeholder (Ghozali, 2007). Teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok (stakeholders). Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam rangka mengelola stakeholder agar perusahaan mendapatkan dukungan dari mereka. Dukungan tersebut dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini dapat meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar, dan pemerintah (Robbins dan Coulter, 2007). Menurut teori ini, perusahaan memiliki kontrak dengan stakeholder-nya. Dengan demikian, stakeholder memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan.

2.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam kerangka hubungan keagenan (*agency theory*) adanya masalah keagenan disebabkan karena konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, kontrak yang tidak lengkap serta adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Secara umum ada dua jenis masalah keagenan dalam perusahaan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul karena pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen (Tipe I) dimana

manajemen berperilaku oportunistik seperti manajer menggunakan dana perusahaan untuk pembelian fasilitas manajer yang berlebihan, *shirking*, atau penggunaan laba perusahaan untuk investasi yang kurang menguntungkan perusahaan. Masalah keagenan tipe I banyak terjadi pada perusahaan dimana struktur kepemilikan perusahaan menyebar secara luas pada berbagai pihak sebagai investor dengan proporsi kepemilikan masing-masing investor yang relatif kecil seperti di Amerika Serikat. Kepemilikan yang kecil menyebabkan investor kurang memiliki insentif untuk melakukan *monitoring* pada manajer secara langsung. Jenis yang kedua adalah masalah keagenan yang timbul karena adanya konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Tipe 2).

Pemegang saham pengendali pada umumnya juga menjadi manajer di perusahaan atau paling tidak menunjuk manajer pilihannya, sehingga berpotensi untuk mendahulukan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas melalui *tunneling* atau *expropriation*. Masalah keagenan tipe II ini sering terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan bentuk pyramidal seperti dibanyak negara di Asia seperti Korea, Thailand, Philipine, dan Indonesia. Adanya masalah keagenan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, serta adanya asimetri informasi, dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya insentif bagi pihak-pihak tertentu untuk memberikan angka laba yang salah atau untuk menyembunyikan informasi. Untuk mengatasi membatasi perilaku oportunistik manajer, perusahaan dapat menggunakan kombinasi berbagai mekanisme *corporate governance* baik mekanisme internal *corporate governance* dewan komisaris dan komite-komite lainnya, monitoring pemegang saham mayoritas, berbagai insentif manajerial dan faktor eksternal seperti ancaman pengambil alihan, persaingan produk, pasar tenaga kerja dan auditor eksternal (Jensen, 1976).

2.3. Kinerja Keuangan Perusahaan (*Corporate Financial Performance*)

Kinerja keuangan adalah kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri sejenis yang ditandai dengan return tahunan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal yang tertuang dalam suatu laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kinerja keuangan yang baik akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi karena para investor tidak ingin mempunyai resiko yang tinggi dalam berinvestasi (Imas, 2008).

Manfaat dari kinerja keuangan adalah untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya, melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, yang digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa mendatang, dan memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. (muslim, 2016).

Kinerja keuangan (finansial) perusahaan dapat dilihat dari laporan tahunan yang dikeluarkan perusahaan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan (Harahap, 2011). Kinerja keuangan dipakai manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan digunakan untuk memprediksi keuangan dimasa yang akan datang. Kinerja keuangan berperan penting karena digunakan sebagai indikator penilaian baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja suatu perusahaan dalam waktu tertentu.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Dalam evaluasi kinerja keuangan tentunya memerlukan standar tertentu baik bersifat eksternal maupun internal. Standar eksternal mengacu pada *competitive benchmarking* yang merupakan perbandingan perusahaan dengan pesaing utama atau industri. Evaluasi perusahaan yang mengacu pada standar eksternal melalui *competitive benchmarking* memberikan gagasan untuk mengembangkan analisis rasio keuangan perusahaan individual dengan mempertimbangkan rasio industri (Martono, 2002).

Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar perilaku tersebut berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran perusahaan. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk menegakkan perilaku yang semestinya melalui reward yang diberikan oleh perusahaan dan hasil kinerja. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan yang berdasar pada sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditentukan (Carolina, 2007).

Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menjelaskan kegiatan operasionalnya yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya dimana kinerja perusahaan baik maka kinerja keuangannya dikatakan meningkat namun ketika kinerja perusahaan buruk maka kinerja keuangan tersebut akan menurun sehingga investor akan tidak tertarik dengan perusahaan tersebut menurut Zulfadin (2003).

Analisis laporan keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis dan investasi. Analisis keuangan dirancang bagi pengusaha, investor, dan kreditor di mana mereka harus memahami bagaimana membaca, mengartikan, serta menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun selama beberapa periode yang lalu (Astuti, 2004).

Teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah analisis rasio. Teknik ini sudah banyak digunakan para analis keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Harahap S, 2011). Rasio yang terdiri dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Dan terakhir adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Syafri, 2008). Jenis rasio profitabilitas adalah

Margin Laba (*Profit Margin*), *Return on Investment (ROI)*, *Return On Total Aset*, *Basic On Total aset*, *Basic Earning power*, *earning per Share*, *Contributin Margin*, *Rasio Rentabilitas* dan *Return on assets (ROA)*.

Salah satu jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah ROA. *Return on assets (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on assets* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on assets (ROA)* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on assets* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. (Syafri, 2008).

Keunggulan ROA (*Return On Asset*) adalah ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini, ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut, dan ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Kelemahan ROA (*Return On Asset*) adalah Pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi memiliki kecenderungan untuk melewatkan *project-project* yang menurunkan divisional ROA, meskipun sebenarnya *proyek-proyek* tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan, Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang, dan Sebuah *project* dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi *project* tersebut

mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan budget pemasaran, dan pengguaaan bahan baku yang relatif murah sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.

2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) yang kini diimplementasikan oleh banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sampai sekarang CSR sebagai sebuah konsep belum memiliki definisi tunggal. Definisi CSR telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar, diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh dalam Susiloadi (2008) yang mendefinisikan CSR sebagai “*A business acts in sociallly responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholder interest*”. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Fitriani (2013) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai tindakan yang muncul dari beberapa aspek baik sosial, diluar kepentingan perusahaan, dan diwajibkan oleh hukum. Sedangkan menurut Anggraini (2006), CSR merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR berusaha memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat sesuai yang dijelaskan sebagai berikut. “*Social responsibility action by a corporation are action that, when judge by society in the future, are seen to have been maximum help in providing necessary amounts of desired goods and service at minimum financial and social cost, distributed as equatably as possible*”. Esensi dari pengertian CSR lebih menekankan pada komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi perusahaan tidak hanya dapat

menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat dalam Wahyudi (2008).

Hal ini berkaitan dengan definisi yang diberikan oleh *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Sukarmi yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) yang menyatakan CSR sebagai: "*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*". CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Corporate Social Responsibility menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kiroyan (2006) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah konsep bahwa perusahaan harus melayani masyarakat sosial sebaik memberikan keuntungan financial kepada pemegang saham dan harus berkelanjutan secara terus menerus yang pada akhirnya para manajer akan menyadari bahwa keputusan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan strategis. Terdapat indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan CSR yaitu indikator yang diterapkan oleh GRI (Global Reporting Initiative). GRI (Global Reporting Initiative) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia.

Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain:

1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Sosial

Corporate Social Responsibility dihitung dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4. GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan online. Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan sustainability reporting. Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. (*Sumber : www.globalreporting.org*). Penjelasannya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.1
91 Indikator Berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah -Keberadaan Pasar
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan.
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang

-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)

	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan –Transportasi

	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil -Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian Bersama

-Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja -Pelatihan dan Pendidikan
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan

-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya -Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki
	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-Diskriminasi	HR3	HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil -Kebebasan

		Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama
	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil

-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen Pemasok	HR10	Persentase penapisan pemasok baru

Atas Hak Asasi Manusia		menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local
-Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas

		ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	S09	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidapatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidapatuhan

		terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: www.globalreporting.org.

2.4.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Dalam pelaporan keuangan ada 2 ungkapan yang telah ditetapkan oleh Bapepam No.Kep.38/PM/1996. Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan informasi sosial perusahaan melebihi persyaratan minimal dari peraturan pasar modal yang berlaku. Oleh karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi sosialnya dalam laporan tahunan

sehingga menyebabkan keragaman hasil atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan.

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Pengungkapan sukarela dilakukan adanya asimetri informasi yang menyebabkan ketidaksempurnaan informasi. Di Indonesia, luas pengungkapan CSR (*environmental disclosure*) masih termasuk ke dalam kategori *voluntary disclosure*. Hal ini dapat dilihat dari PSAK No. 1 (revisi 1998) mengenai penyajian laporan keuangan pada bagian informasi tambahan. PSAK No. 1 tersebut menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia diberi kebebasan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi lingkungan dalam laporan keuangannya. Maka dari itu, ada perusahaan yang mengungkapkan informasi lingkungan dalam laporan keuangannya dan ada perusahaan yang tidak mengungkapkannya. Walaupun termasuk *voluntary disclosure*, kini kesadaran perusahaan publik di Indonesia untuk melakukan *environmental disclosure* mulai timbul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan *Corporate Social Responsibility*. Selain itu, adanya kesepakatan DPR dan pemerintah dalam amandemen RUU PT yang mewajibkan setiap PT menyisihkan dana untuk kegiatan sosial dan lingkungan sehingga membuat perusahaan harus mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dalam pelaporan perusahaan juga semakin menambah dan mempengaruhi kesadaran perusahaan.

2.4.2 Kinerja sosial

Menurut Orlitzky (2000), kinerja sosial perusahaan (*Corporate Social Performance-CSP*) didefinisikan sebagai “sebuah konfigurasi prinsip-prinsip organisasi bisnis dari tanggung jawab sosial, proses tanggapan sosial, dan kebijakan-kebijakan, program, dan hasil yang dapat diamati sebagai hubungan-hubungan tersebut kepada hubungan perusahaan dalam bermasyarakat. Sedangkan kinerja sosial perusahaan adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari

peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. Semakin sebuah perusahaan mengimplementasikan CSR dengan baik, maka kinerja sosial perusahaan tersebut akan semakin terangkat. Hasil yang diharapkan, tentu kembali kepada perusahaan dalam bentuk dukungan publik dan penguatan faktor sosial terhadap pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dari masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan.

2.4.3 Kinerja lingkungan

Usaha pelestarian lingkungan atau yang dikenal dengan kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan mendorong munculnya praktek akuntansi lingkungan sebagai alat pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik atas usaha yang dilakukan perusahaan tersebut. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Suratno *et al.*, 2006). Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kinerja lingkungan didefinisikan sebagai “hasil dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya”. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, dan target lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Selama ini perusahaan cenderung untuk mementingkan kepentingan investor, sedangkan kepentingan pihak lain, seperti karyawan dan masyarakat diabaikan, dianggap sebagai eksternalitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan persaingan nilai upah ditekan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan tidak ada jaminan kelanggengan bekerja bagi buruh harian lepas. Selain itu, pengurangan upah buruh dan ketiadaan jaminan kerja akan menguntungkan pihak pemilik perusahaan. Masalah lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan berupa perusakan lingkungan dari perusahaan seperti yang bergerak di bidang pertambangan Sturm (1998).

Pelestarian lingkungan di samping bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi perusahaan khususnya perusahaan yang memanfaatkan lingkungan dan mendapatkan keuntungan dari lingkungannya.

Tanggung jawab sosial memiliki berbagai pengaruh pada kinerja finansial perusahaan. Sebuah pandangan muncul bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat berperan untuk kinerja finansial sebuah perusahaan. Pendekatan ini telah diuraikan sebagai “*enlightened shareholder approach*”, menyatakan bahwa pembuat keputusan perusahaan harus mempertimbangkan berbagai hal mengenai sosial dan lingkungan jika mereka memaksimalkan keuntungan jangka panjang (Sudaryanto, 2011).

2.4.4 Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi adalah kinerja keuangan perusahaan - perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan (Luciana, 2007). Kinerja ekonomi secara makro dari sekumpulan perusahaan dalam suatu industri. jadi dengan demikian kinerja ekonomi adalah kinerja keuangan perusahaan dalam bidang ekonomi dan merupakan suatu industri yang sama menurut (Suratno dkk, 2006)

Tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. bagi masyarakat biasa, bukan konsep abstrak melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupannya sehari-hari. Untuk memenuhi keinginan tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkeselimbangan di sertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan tidak termakan oleh kenaikan harga. (Boediono, 2009).

2.4.5 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat sejak lahir haruslah dihormati dan didukung oleh siapa pun, mulai dari penguasa, individu, pemerintah maupun entitas bisnis seperti perusahaan. Perusahaan dalam paradigma tradisional, hanya dipandang sebagai sebuah entitas bisnis yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan semata.

Walaupun ada peran perusahaan dalam isu-isu sosial (non bisnis), aktivitas ini masuk dalam wilayah yang sangat terbatas pada aktivitas kedermawanan semata (filantropi). Paradigma ini kemudian direvisi dengan memunculkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), suatu konsep yang mendorong perusahaan agar turut serta masuk kedalam wilayah-wilayah persoalan sosial termasuk di dalamnya HAM.

Terutama pada aspek hak-hak asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Keseluruhan hal di atas, menyiratkan pengertian bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam konteks subjek yang mengemban tugas untuk menegakan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak Ekosob. Paradigma lama yang menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya pengemban bagi implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi tidak relevan. Namun perusahaan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaannya, harus juga dipandang sebagai pengemban tugas untuk bertanggung jawab terhadap pemajuan hak-hak asasi manusia. (Taufik, 2008).

2.4.6 Masyarakat

Peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai

memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktik yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (*socially responsible investing*).

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik", namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan pada masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu etika baik di mata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukanlah sekadar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

2.4.7 Tanggung jawab Atas Produk

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensinya praktik produksi yang bertanggung jawab seperti produksi yang menjamin keselamatan pelanggan, dan memiliki peringatan yang semestinya untuk mencegah efek samping negative. Sedangkan praktik penjualan yang bertanggung jawab seperti pedoman harga, periklanan yang beretika dan survey kepuasan pelanggan. Untuk memastikan tanggung jawab

kepada pelanggan perlu diperhatikan seperti, menetapkan kode etik, memantai keluhan, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan.

Berbicara tentang tanggung jawab social terhadap konsumen berarti kita berbicara tentang nyaman atau tidaknya konsumen menggunakan barang/benda produksi kita. Disini kita dituntut untuk membuat konsumen sedemikian rupa menjadi nyaman dan terima semua produksi kita, selain itu kita juga mau menerima kritik dan saran yang disampaikan konsumen kepada kita untuk kedepannya kita dapat membuat konsumen kita menjadi betah dan senang dengan produksi yang kita buat selanjutnya. Berikut contoh tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen-konsumen :

- a. Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis.
- b. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas.
- c. Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dijual.
- d. Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar.
- e. Konsumen dapat memesan sesuai dengan yang diinginkan.
- f. Menerima saran dan kritik dari konsumen.

(<http://mohammadmahareza.blogspot.co.id/2014/10/tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html>).

2.5 Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan (Wardani, 2008).

Menurut Organization of Economic Cooperation and Development (2004) GCG adalah suatu sistem di mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari GCG menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari GCG juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (2000) GCG adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Menurut Rahmawati (2004) GCG didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness ,transparency ,accountability ,independency dan responsibility , yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan definisi atau pengertian GCG dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya GCG adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham,

kreditur dan lain-lain, demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

Penelitian terkait GCG dilakukan oleh Hidayah (2007), yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya pengungkapan informasi. Penerapan GCG yang diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* (Pranata, 2007). Sedangkan penelitian Meythi (2011) yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan skor penerapan GCG yang dipublikasikan oleh IICG. Penelitian Ferly (2014) dan David (2011) juga menggunakan FCGI untuk mengukur penerapan skor. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian Meythi yang diukur dengan skor penerapan GCG dipublikasikan oleh IICG. Indeks yang digunakan untuk memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika perusahaan memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan GCG. Menurut Meythi (2011) penentuan skor total untuk GCG terbaik didasarkan pada perhitungan rata-rata tertimbang, dengan rincian bobot per kriteria sebagai berikut:

a. Hak-hak Pemegang Saham = 20%

- Pemegang saham tidak berhak memberikan pendapat
- Hanya sebagian pemegang saham yang berhak memberikan pendapat yang mempunyai porsi
- kepemilikan terbesar
- Setiap pemegang saham berhak memberikan pendapat, tetapi mayoritas / pemilik tetap yang mengambil keputusan
- Setiap pemegang saham berhak memberikan pendapat, tetapi seringkali mayoritas yang mendominasi, pengambilan keputusan secara obyektif
- Setiap pemegang saham berhak memberikan pendapat secara merata tidak ada yang mendominasi

b. Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham= 15%

- Belum ada sistem yang mengatur hal tersebut
- Pemegang saham tidak mendapat laporan dan tidak berhak memberikan masukan
- Pemegang saham berhak memberikan masukan pada perusahaan, tapi tidak mendapat laporan secara berkala
- Pemegang saham berhak mendapat laporan secara berkala, tapi tidak berhak memberikan masukan pada perusahaan
- Pemegang saham berhak memberikan masukan pada perusahaan, dan mendapat laporan secara berkala mengenai kondisi perusahaan

c. Peran Para Pemangku Kepentingan = 15%

Perusahaan sudah sangat jelas memberikan pedoman bagi setiap organ perusahaan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya. Karena di setiap divisi sudah ada SOP-nya masing-masing. Namun, dilihat dari strukturnya masih ada jabatan yang dirangkap oleh komisarisnya sendiri yaitu sebagai marketing manager.

d. Keterbukaan dan Transparansi = 25%

Informasi yang disalurkan di dalam perusahaan sangatlah terbuka dan baik. Hal ini bisa dilihat dari media-media yang digunakan dalam penyampaian informasi sangat beragam dengan tujuan informasi terasampaikan dengan baik. Dan juga informasi yang ada dimengerti setiap pemangku kepentingan karena setiap informasi tersebut diolah lebih dahulu jika memang ada yang perlu diolah.

e. Tanggung jawab Dewan = 25%

Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sudah dijalankan dengan memberikan barang kebutuhan pada pantin asuhan maupun jompo. Namun, dari sisi lingkungan belum dilaksanakan, dan dari sisi karyawan memang perusahaan sudah memberikan jamsostek dan tunjangan pada karyawan, tetapi fasilitas yang diberikan masih kurang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya, antara lain:

No	Nama peneliti dan tahun	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
1.	Rosyid (2013)	Pengaruh kinerja sosial dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan	Kinerja sosial dan kinerja keuangan	Analisis regresi berganda	Kinerja sosial dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan positif berpengaruh
2.	Fitriyani (2012)	Keterkaitan kinerja lingkungan, pengungkapan CSR dan kinerja Finansial	Kinerja lingkungan CSR Disclosure, kinerja finansial	Analisis deskriptif, analisis regresi berganda	Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan. pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh

					signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan	
6.	Astuti (2013)	S	Pengaruh kinerja sosial dan kinerja lingkungan Terhadap kinerja keuangan perusahaan	Kinerja sosial dan kinerja lingkungan	Regresi berganda	Menyatakan bahwa pengungkapan kinerja social dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dari hasil pengujian variabel kinerja sosial dapat disimpulkan bahwa kinerja sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

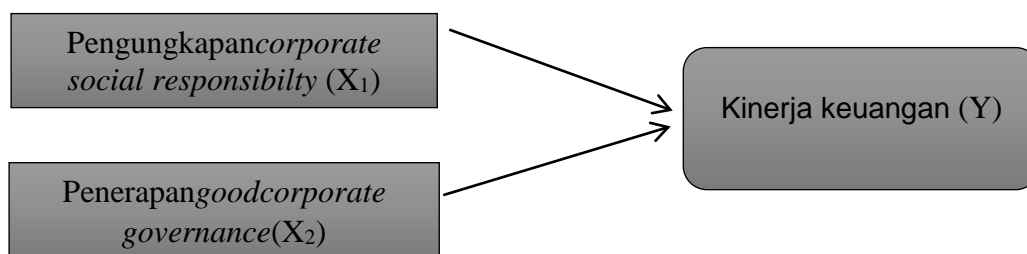
7.	Roes Angri (2016)	Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Leverage, Independensi dan Rentabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Leverage, Independensi dan Rentabilitas	Regresi berganda	Hal ini menjelaskan Good Corporate Governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan
8.	Meythi (2011)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan perusahaan	Penerapan Good Corporate Governance	Non probabilitas	Hal ini menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return on Equity (ROE).

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Kerangka penelitian menjelaskan alasan pemilihan suatu variabel penelitian dan bagaimana hubungan antar variabel penelitian yang dikembangkan dalam model penelitian yang akan diteliti (Darwis dkk, 2012:12).

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana hubungan atau pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan Penerapan *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan apakah dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu dan memberikan manfaat dengan meningkatnya kinerja keuangan. Berdasarkan uraian-uraian yang ditulis sebelumnya, dan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian dapat dirumuskan menjadi kerangka pikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh pengungkapan *corporate sosial responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlukan di laopran tahunan karena akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan yang berdampak pada reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan perusahaan yang tidak mengungkapkan, akibatnya kinerja keuangan perusahaan pun akan meningkat. Teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam rangka mengelola stakeholder agar perusahaan mendapatkan dukungan dari mereka. Sementara pengungkapan CSR dihitung berdasarkan pada standar global reporting initiatives (GRI-G4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih

konsisten dalam kegiatan CSR karena secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Rosyid, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengungkapan *corporate sosial responsibility* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.8.2 Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan

Good Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Untuk mengatasi membatasi perilaku oportunistik manajer, perusahaan dapat menggunakan kombinasi berbagai mekanisme *corporate governance* baik mekanisme internal *corporate governance*. Penerapan prinsip responsibility dalam GCG juga dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan yang baik, karena esensi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* secara baik akan memiliki kinerja operasional yang baik. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Sedangkan pada hasil Angri (2014) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.